SKRIPSI

PENGARUH PEMBIAYAAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN MAJENE

HERMANSYAH

C0217320

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2023

PENGARUH PEMBIAYAAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN MAJENE

HERMANSYAH
C02 17 320

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Sayarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Jumardi, SE., M.Si	**Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak**
NIP.19800919 200604 1 022	NIP.19930820 201903 1 016

Menyetujui:

Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M, S.Pd., M.Ak
NIP: 19831203 201903 2 006

PENGARUH PEMBIAYAAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN MAJENE

Dipersiapkan dan disusun oleh:

HERMANSYAH
C02 17 320

Telah diuji dan diterima Panitia ujian
Pada Tanggal 06 Juni 2023 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
1. Jumardi, SE., M.Si	Ketua	1).....
2. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak	Sekertaris	2).....
3. Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak., CAR	Anggota	3).....
4. Aswar Rahmat, SE., M.Si	Anggota	4).....
5. Muhammad Mukhram, S.Pd., M.Ak	Anggota	5).....

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Jumardi, SE., M.Si	**Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak**
NIP.19800919 200604 1 022	NIP.19930820 201903 1 016

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP: 19670325 199403 2 001

ABSTRAK

HERMANSYAH, Pengaruh Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Kualitas Pelayanan Publik untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi, dibimbing oleh Jumardi, SE., M.Si dan Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Apakah pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas pelayanan publik sebagai variabel intervening. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dokumentasi dan penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Majene. Jumlah sampel sebesar 204 orang dan pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode sampel insidental. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah pengujian menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan program SPSS.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks kualitas pelayanan publik, indeks kualitas pelayanan pubik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pembiayaan pendidikan berpengaruh signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas pelayanan publik. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan menjadikan pelayan publik lebih baik dan berkualitas sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dipenuhi dan menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Kata Kunci : Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

HERMANSYAH, *The Effect of Government Financing in the Education Sector on the Public Service Quality Index to Support Economic Growth, supervised by Jumardi, SE., M.Si and Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak.*

This study aims to determine: Does government financing in the education sector affect economic growth through the public service quality index as an intervening variabel. Data collection was carried out by means of literature studies, documentation and distribution of questionnaires. The population in this study were all people in Majene Regency. The number of sample is 204 people and sample selection in carried out using the incidental sampel method. Then data analysis technique used is testing using pat analysis with the help of the SPSS program.

The results of this Study show that: Government financing in the education sector has a significant effect on the public service quality index, the public service quality index has a significant effect on economic growth, education financial has a direct significant effect on economi growth and government financing in the education sector has an indirect significant effect economic growth through public service quality index. Government funding in the education sector makes public services better and of better quality so that economic growth can be fulfilled and better than in previous years. .

Keywords : Government financial in the education sector, public service, economic growth.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan suatu negara agar dapat mengendalikan masalah-masalah perekonomian yang terjadi dalam jangka panjang. Keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat melalui kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dapat diukur berdasarkan salah satu indikator, yaitu pendidikan yang diukur melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan terhadap indeks kualitas pelayanan publik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tujuan utama bagi suatu negara ataupun daerah. Menurut Sukirno dalam Yoyon Safrianto (2018), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti pertambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB menggambarkan pergerakan aktivitas perekonomian pada suatu daerah yang dapat dicapai dalam satu periode.

Menurut Dewi, dkk (2017) salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui PDRB atau PDRB per kapita pada masing-masing daerah. bilamana PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tertentu, maka disebut dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita adalah nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi (Sudiharta dalam I. Gede Komang Angga Dianaputra, 2017). Angka PDRB per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah. Terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan melalui proses pembangunan untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene dari tahun 2016 sampai pada tahun 2021 mengalami penurunan, dari tahun 2016 ke tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 10,24%, kemudian pada tahun 2018 sebesar 10,07%, pada tahun 2019 sebesar 7,76%, kemudian pertumbuhan ekonomi yang paling rendah terjadi di tahun 2020 yaitu 0,32%, dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,35%.

Menurut Septiana Sanggelorang (2015:2), pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang berdasar pada kebutuhan masing-masing daerah sehingga akan terwujud perubahan ke arah yang lebih baik sesuai sasaran tujuan pembangunan tersebut. Terkait dengan pembangunan, paradigma yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, dapat dilihat melalui tingkat kualitas hidup manusia suatu daerah. Maka, dalam menjalani program-program pembangunan diperlukannya kualitas manusia yang baik sehingga sasaran dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dapat tercapai (Ni Ketut Sandri, 2016).

Pembangunan manusia merupakan salah satu aspek pendukung yang sangat utama dalam memajukan negara atau wilayah. Kemajuan suatu negara atau wilayah tidak hanya diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan mencakup kualitas manusia yang terdiri dari aspek pendidikan yang tercermin dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta kesehatan yang tercermin melalui angka harapan hidup masyarakatnya (Laisina dkk, 2015:2). Kualitas manusia dapat menjadi modal dasar bagi proses pembangunan karena dalam proses pembangunan, manusia tidak hanya menjadi subjek melainkan juga menjadi sebagai objek pembangunan.

Dalam mendorong peran manusia dalam proses pembangunan, maka dibutuhkannya investasi untuk mempersiapkan dan menciptakan sumber daya manusia yang produktif, dimana dalam hal ini mengacu pada investasi pendidikan dan kesehatan (Danawati dkk, 2016). Investasi publik menjadi instrumen yang penting dari kebijakan yang tepat sasaran sehingga signifikan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi (Milova dalam I. Gede Komang Angga Dianaputra, 2017). Dalam hal ini investasi didapat dari pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil,

bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga (Dwi Agung Nugroho Arianto, 2016). Peran pemerintah dalam pelayanan publik ini sangat penting untuk mengelola anggaran dalam hal belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif. Indeks pembangunan manusia adalah salah satu hal yang mendasari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan (Adelfina, 2016). Angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah untuk pendidikan dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita adalah beberapa faktor utama untuk menumbuhkan ekonomi.

Investasi sumber daya manusia (*human investment*) dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan mempengaruhi produktivitas masyarakat (Dewi dkk dalam I. Gede Komang Angga Dianaputra, 2017). Kemajuan suatu daerah dapat diukur berdasarkan salah satu indikator yang utama yaitu pendidikan. Apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi, maka semakin besar peluang masyarakat masuk ke dalam dunia kerja. Dengan pendidikan yang tinggi, masyarakat mampu untuk meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui peningkatan produktivitas dan pendidikan yang tinggi juga mempengaruhi pelayanan publik menjadi lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Pendidikan adalah salah satu aspek penting bagi proses pembangunan karena berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan manusia (Ni Made Sasih Purnami, 2016).

Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, memiliki kebutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang

profesional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah bagaimana memberikan pelayanan publik yang mampu memuaskan masyarakat. Adanya implementasi kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah (Kotamadya atau Kabupaten) di Indonesia harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya dengan standar minimal. Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra didasarkan referensi yang jelas (Bilgah, 2018). Dalam mendukung pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel dibutuhkan seseorang yang berpendidikan yang mengerti tentang dan bagaimana cara pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan tujuan pelayanan publik tercapai dengan maksimal.

Hampir setiap negara memprioritaskan pembangunan pendidikan dalam program pembangunan nasional karena hal terpenting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan suatu negara adalah tersedianya penduduk yang terdidik dalam segi kuantitas yang memadai dan kualitas yang baik. Pembangunan

pendidikan dari tingkat daerah hingga nasional harus dapat menjamin peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan guna menghadapi tantangan kedepan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal maupun nasional (Isti dalam I. Gede Komang Angga Dianaputra, 2017).

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang pendanaan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2014 Tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pasal 137 ayat (5) Pemerintah kabupaten wajib memprioritaskan anggaran untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dasar sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran sektor pendidikan pada APBD. Pengalokasian anggaran pendidikan ini menjadi hal penting karena pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi (Treena Wu dalam I. Gede Komang Angga Dianaputra, 2017).

Anggaran APBD sektor pendidikan yang diperoleh Kabupaten Majene hampir di setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Neraca Pendidikan Daerah (NPD), mulai dari tahun 2016-2021 anggaran pendidikan mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2017. pada tahun 2016 anggaran pendidikan sebesar Rp.269.260.000.000 kemudian mengalami pengurangan menjadi Rp.231.930.000.000 di tahun 2017, tetapi kembali meningkat pada tahun-tahun setelahnya. Sampai pada tahun 2021 pemerintah

Kabupaten Majene mengalokasikan persentase anggaran urusan pendidikan APBD (di luar transfer daerah) sebesar Rp.281.810.000.000. Besarnya jumlah pembiayaan pendidikan akan mempengaruhi pembangunan manusia pada daerah tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu dimensi dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, Kabupaten Majene memiliki IPM pada tahun 2021 sebesar 67,29%, angka ini meningkat 0,38% dibandingkan tahun 2020, dimana peningkatannya paling rendah kedua di Sulawesi Barat. Selama periode tahun 2011-2021, IPM Kabupaten Majene rata-rata tumbuh sekitar 0,48% per tahun. Untuk mengukur IPM dapat dilihat melalui tiga dimensi pendekatan dasar yang diukur dari empat indikator yaitu kesehatan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dan pengeluaran dengan indikator Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKD). Pada tahun 2021 Kabupaten Majene memiliki tingkat AHH 61,77%, RLS 3,01%, HLS 13,62% dan PKD Rp.10.028.000 (BPS Kab. Majene 2021).

Kabupaten Majene adalah salah satu daerah tingkat II yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Banggae. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 947,84 km² dan berpenduduk sebanyak 173.844 jiwa pada tahun 2020. Kabupaten Majene adalah pusat pendidikan dan menjadi penerima anggaran APBN sektor pendidikan tertinggi di Sulawesi Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti apa saja kontribusi atau pengaruh pembiayaan pemerintah pada bidang pendidikan terhadap pembangunan perekonomian pada suatu daerah, dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Kualitas Pelayanan Publik untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Majene”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap indeks kualitas pelayanan publik pada Kabupaten Majene?
2. Apakah pengaruh indeks kualitas pelayanan publik berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Majene?
3. Apakah pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Majene?
4. Apakah pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas pelayanan publik pada Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan terhadap indeks kualitas pelayanan publik pada Kabupaten Majene.
2. Untuk menganalisis pengaruh indeks kualitas pelayanan publik terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Majene.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Majene.
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas pelayanan publik pada Kabupaten Majene.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihasilkan dalam penelitian ini, bisa dilihat dari beberapa jenis manfaatnya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi media untuk menerapkan konsep dan teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan tentang pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, pelayanan publik secara maksimal dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan melalui berbagai temuan pada penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan, indeks kualitas pelayanan publik, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Majene di Sulawesi Barat, serta kedepannya dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam meneliti pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dalam menunjang peningkatan indeks kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan

Para pakar ekonomi klasik seperti Malthur, Ricardo dan Mill mengemukakan pandangan yang optimis bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terdapat hubungan yang bersifat resiprokal (*reciprocal relationship*) atau saling berkaitan (Daniem dalam Basri Bado dkk 2017). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa pendidikan dengan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang interaktif atau memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi.

Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mendorong peningkatan kehidupan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia atau human capital dapat meningkat ketika pendidikan berkembang. Pendidikan tumbuh dan berkembang karena adanya investasi pemerintah, baik itu investasi individu maupun investasi publik. *Human capital* adalah pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seseorang yang digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dalam hal ini yaitu pada bidang pendidikan. Adapun asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi (Nur Azizah 2016).

Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pengeluaran pembangunan pada sektor pendidikan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan bagi penduduk Indonesia secara merata. Pembangunan pendidikan dari tingkat daerah hingga nasional harus dapat menjamin peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan guna menghadapi tantangan ke depan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan baik lokal maupun nasional (Isti dalam I. Gede Komang Angga Dianaputra, 2017). Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan juga akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tingginya tingkat rata-rata pengetahuan dan keterampilan masyarakat, maka semakin mudahnya setiap individu memahami, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dalam usia bekerja sehingga dapat meningkatkan standar ekonomi suatu negara.

Berdasarkan (Pasal 1 Butir 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang APBN Tahun 2012) Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang di atas, prosedur anggaran pendidikan dalam APBN terbagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat.
2. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah.
3. Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan Kabupaten Majene dari tahun 2016 sampai pada 2021 mengalami peningkatan yang cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan dalam membangun pendidikan yang lebih baik lagi. Berikut adalah salah satu contoh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan Kabupaten Majene:

Pada tahun 2020 pembiayaan pemerintah sektor pendidikan Kabupaten Majene yang diperoleh dari APBD sebesar Rp. 990.400.000.000, pembiayaan tersebut terbagi tiga yaitu dana daerah Rp. 199.400.000.000, transfer daerah Rp. 103.000.000.000, dan non program urusan pendidikan Rp. 687.700.000.000. Pembiayaan pemerintah sektor pendidikan ini mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebesar 22,48%. berikut adalah tabel rincian dana transfer daerah dan tabel alokasi anggaran bantuan pemerintah pada bidang pendidikan pada Kabupaten Majene tahun 2020:

Tabel 2.1 Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan

Keterangan	**Dana Anggaran (Miliar)**
DAK Fisik	35,79
TPG	7,76
Tamsil	0,74
Tunjangan Khusus Guru	4,19
DAU (Gaji GTK PNSD)	86,86

Keterangan	Dana Anggaran (Miliar)
BOP PAUD	4,54
Total	**139,91**

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan yang paling banyak dikeluarkan yaitu untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Gaji Guru atau Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil Daerah (Gaji GTK PNSD) sebesar Rp.86.860.000.000 atau 43,6% dari total dana transfer daerah bidang pendidikan (npd.kemdikbud).

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah (APBN)

Keterangan	Alokasi Anggaran (Miliar)
PAUD-DIKMAS	0,45
SD	19,37
SMP	15,34
GTK	35,16
Kebudayaan	0,00
BOP PAUd	4,54
Total	**70,32**

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah pembiayaan terbanyak yang dikeluarkan dari alokasi anggaran bantuan pemerintah yang bersumber dari APBD yaitu untuk membiayai gaji Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK) sebesar Rp. 35.160.000.000 atau 50% dari total alokasi anggaran bantuan pemerintah (npd.kemdikbud).

2.1.2 Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Pada umumnya pemerintah negara memiliki dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan bertujuan untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara (*welfare state*). Kedua fungsi ini menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang yang bersangkutan terhadap kedua fungsi tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik, mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (2018), pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan menurut Moenir dalam Ira

Rahmadani (2018), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayanan publik yang diuraikan tersebut, dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan (Rahman Mulyawan, 2016).

Menurut Zeithaml dalam Firda Amanda Wulandari (2018) untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, terdapat indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi tersebut, yaitu:

1. *Tangibles* (bukti langsung), kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dll.
2. *Reliability* (kehandalan), kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. *Responsiveness* (daya tanggap), kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat, tepat dan tanggap terhadap keinginan konsumen.
4. *Assurance* (jaminan), kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
5. *Empathy* (empati), sikap tegas, tulus dan penuh perhatian terhadap konsumen.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Prof. Simon Kuznet, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Medita Maya Putri Nugroho, 2020).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output pendapatan produk domestik bruto dalam jangka panjang sehingga dapat menyebabkan bertambahnya barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

2. Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, Menurut Patta Rapanna (2016) proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan pengelolaan SDA yang baik dapat menciptakan sebuah produktivitas yang tinggi.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih kepada seberapa besar manfaat efisiensi mereka.

c. Akumulasi Moda

Permodalan adalah persediaan faktor produksi yang dapat dihasilkan. Penambahannya dapat meningkatkan kapasitas produktif sebuah perekonomian dan merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

d. Tenaga Manajerial dan Organisasi Produk

Organisasi produksi merupakan salah satu bagian terpenting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Organisasi ini dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatannya. Dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, para wiraswasta (*entrepreneur*) berperan sebagai pengendali berbagai sumber produksi dalam proses produksi dengan memperkenalkan penemuan baru atau disebut dengan inovasi.

e. Faktor Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan atau kemajuan teknologi dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia sehingga dapat meningkatkan produktivitas, modal dan faktor produksi lainnya.

f. Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Pembagian kerja dan spesialis dalam proses produksi akan menyebabkan peningkatan produksi. Kedua hal ini akan menimbulkan perubahan besar terhadap perluasan produksi dan dapat membantu perkembangan dan kemajuan produksi sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

g. Faktor Non-ekonomi

Yang termasuk dalam faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

1) Faktor Politik dan Administrasi Pemerintahan

Struktur dan situasi politik serta administrasi pemerintah yang lemah merupakan faktor penghambat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, biasanya ini terjadi pada negara-negara berkembang. Politik yang tidak stabil serta pemerintahan yang lemah mengundang munculnya kecurangan para pemerintah yang tidak bertanggung jawab seperti koruptor, ini sangat menghambat kemajuan ekonomi.

2) Aspek Sosial Budaya

Kebiasaan bersosialisasi masyarakat mempengaruhi motivasi kerja. Sebagai ilustrasi, misalnya pendidikan dan kebudayaan barat membawa pemikiran baru dan semangat baru untuk menghasilkan produk yang baru pula, dengan begitu dapat menambah produksi dan berkontribusi memajukan atau menumbuhkan perekonomian.

3) Susunan dan Tertib Hukum

Susunan dan tertib hukum juga mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan ekonomi. pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang keliru seringkali menghambat kemajuan ekonomi, sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi.

3. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Adapun cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathrm{Gt} = \frac{\mathrm{PDBt} - \mathrm{PDBt} - 1}{\mathrm{PDBt} - 1} \mathrm{x}\ 100$$

Keterangan:

Gt : laju Pertumbuhan Ekonomi

PDBt : nilai PDB periode t

PDBt-1 : nilai PDB periode sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berikut adalah tabel PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dan disertai dengan persentase pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2021 pada Kabupaten Majene:

Tabel 2.3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Majene Tahun 2017-2021

Tahun	PDRB (Miliar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2017	4.190,4	10,24
2018	4.612,7	10,07
2019	4.970,7	7,76
2020	4.986,8	0,32
2021	5.204,01	4,35

Sumber: BPS Kabupaten Majene, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nilai PDRB semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya berkurang dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Adapun rata-rata pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Majene antara tahun 2017-2021 adalah 6.55%.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan acuan dalam melakukan penelitian:

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	I Gede Komang Angga Dianaputra, Luh Putu Aswitari, (2017). *"Pengaruh Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Kualitas Manusia Serta Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota*	Dari penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan dan positif terhadap indeks kualitas manusia, 2. Pembiayaan pemerintah di sektor	Obyek yang diteliti sama- sama pada Kabupaten	Pada penelitian ini memiliki dua variabel independen yaitu pendidikan dan kesehatan.

No	Nama & Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
	Provinsi Bali Tahun 2011-2015".	pendidikan dan kesehatan serta indeks kualitas manusia memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, serta 3. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas manusia.		
2.	Sigit Wibowo, (2016). *"Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Studi di Provinsi Jawa Tengah".*	Kesimpulan dan hasil penelitian ini: 1. Hasil analisis simultan dengan 2SLS menggambarkan bahwa belanja pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan serta laju pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh nyata terhadap nilai indeks pembangunan manusia, 2. Hasil analisis stage 2, belanja pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan serta nilai IPM terhadap laju PDRB menunjukan tidak berpengaruh nyata, 3. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan ekonomi, 4. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak berpengaruh nyata terhadap nilai IPM, dan 5. kesehatan tidak berpengaruh terhadap nilai IPM, dan berpengaruh tehadap PDRB.	Dalam Penelitian ini memiliki variabel independen yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi.	Penelitian ini lebih berfokus kepada indeks pertumbuhan manusia.

No	Nama & Judul	Kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
3.	Bilgah, (2018). "*Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Dinas Perhubungan Kota Depok*".	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan sangat kuat antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Depok.	Persamaan penelitian ini dengan judul yang saya angkat yaitu juga meneliti tentang pelayanan publik.	Perbedaan penelitian ini adalah meneliti mengenai kepuasan pelanggan atau masyarakat atas pelayanan publik.

Sumber: Hasil Pengolahan Dari Beberapa Penelitian Terdahulu, 2021

2.3 Hubungan Antara Variabel

2.3.1 Hubungan Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Kualitas Pelayanan Publik

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid dalam Merang Kahang, 2016).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier dalam Merang Kahang, 2016).

Menurut Kuncoro dalam Godensia Gering (2017) menyatakan bahwa orang-orang yang berpendidikan rendah maka pilihan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sangat terbatas. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka dapat dinyatakan bahwa seharusnya kualitas kerja tersebut semakin baik dan peluang kerja semakin luas, karena biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kemampuan dan keterampilan mereka akan bertambah. Dengan demikian semakin tinggi kemampuan dan keterampilan, maka imbalan gaji atau tunjangan lainnya yang diperoleh akan semakin meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi juga meningkatkan keahlian, pengalaman dan pengetahuan aparatur yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menciptakan pelayanan yang berkualitas dan membuat masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diperoleh.

2.3.2 Hubungan Indeks Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Melalui pelayanan publik oleh pemerintah, pemerintah berusaha memberikan pelayanan semaksimal mungkin khususnya di tiga sektor yang mendasar yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi untuk pembangunan manusia dapat berjalan dengan efisien dan efektif sehingga pertumbuhan ekonomi pada suatu negara/daerah meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran hasil kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.

Birokrasi pemerintah atau aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara. Albrow dalam Erwin R (2018) menyatakan bahwa, kebanyakan dari keberhasilan pembangunan ekonomi dan sosial di negara manapun, tergantung pada kualitas dan efektivitas pegawai negerinya. Oleh sebab itu, produktivitas maupun efektivitas dan efisiensi organisasi negara atau pemerintah amat tergantung pada aparatur negara, karena merekalah yang akhirnya menjadi pelaksana pemerintahan dan pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat (1) Tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola oleh pemerintah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisiensi, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan terus menerus meningkat tidak terlepas dari peran pemerintah atau pelayan masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berlandaskan Undang-Undang dan aturan-aturan yang ada sehingga mampu menciptakan pelayanan yang berkualitas dan membuat masyarakat puas dalam menerima pelayanan.

2.3.3 Hubungan Pembiayaan Pemerintah di Sektor Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Anggaran pemerintah atas pendidikan merupakan salah satu investasi terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan merupakan modal dasar manusia sebagai pelaku pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Dengan modal dasar yaitu pendidikan yang berkualitas, maka peningkatan pertumbuhan ekonomi mudah dicapai. Pertumbuhan ekonomi selalu berhubungan dengan para pelaku ekonomi yaitu pemerintah yang berperan dalam instrumen kebijakan fiskal. Melalui hal tersebut, berarti bahwa pemerintah memiliki peran dalam menentukan besaran pembiayaan/pengeluaran yang dianggap tepat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kebijakan pemerintah dalam hal anggaran untuk sektor pendidikan memberikan pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Intinya bahwa setiap kenaikan alokasi pembiayaan sektor pendidikan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu investasi di bidang pendidikan sangat diperlukan untuk memajukan perekonomian (Jorgenson dan Fraumeni dalam Muhammad Amir Arham, 2019).

Sangat jelas bahwa pendidikan merupakan faktor paling penting dalam pembangunan ekonomi (Ariani, 2015). Semua negara tidak bisa mencapai pembangunan ekonomi secara maksimal dan berkesinambungan tanpa adanya investasi substansial dalam pembentukan modal manusia. Dengan begitu, negara-negara maju sangat memperhatikan sektor pendidikan, hal ini ditunjukan dari rasio belanja sektor pendidikan di negara maju di atas rata-rata 20 persen. Di Indonesia sendiri awalnya kurang memperhatikan sektor pendidikan, lebih banyak memberikan prioritas terhadap modal fisik. Pada tahun 1997/1998 setelah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia cara pandang pemerintah dan masyarakat mulai berubah, terlebih setelah dilakukannya perubahan UUD 1945 barulah memperlihatkan komitmen memajukan sektor pendidikan dengan alokasi anggaran 20% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. bukan hanya APBN, setelah desentralisasi di Indonesia pemerintah daerah juga ikut memberikan proporsi anggaran sebesar 20% untuk sektor pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan hasil dari penelitian (Muhammad Amir Arham, 2019) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan memiliki korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi setiap provinsi di Indonesia. Jika pemerintah menambah alokasi belanja pendidikan akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, alokasi belanja sektor pendidikan berpeluang terus mengikuti APBN atau pun APBD yang meningkat setiap tahunnya, karena terdapat 20% anggaran untuk sektor pendidikan dalam APBN/APBD, dengan asumsi pendapatan negara meningkat pula, khususnya dari pajak.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul dan teori-teori yang dipaparkan sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka konsep di bawah ini:

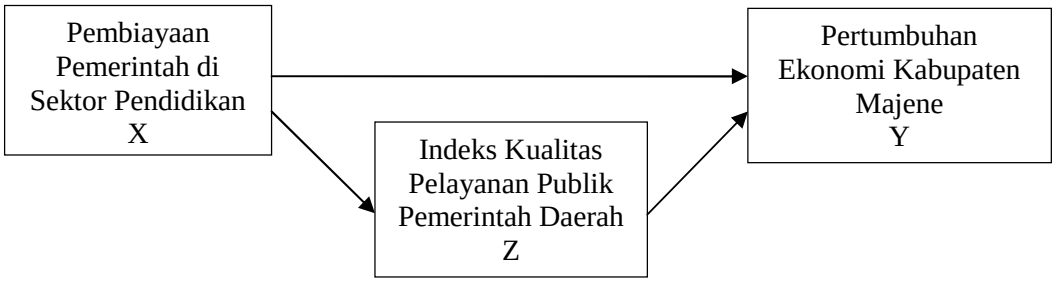

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan variabel independen yaitu pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan, variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene dan variabel interveningnya adalah kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. variabel independen ini diperkirakan akan mempengaruhi variabel dependen yang berarti bahwa peningkatan dan penurunan pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan akan menguatkan atau melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan diperkirakan mempengaruhi kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas karena orang-orang atau oleh pemberi pelayanan yang profesional dan ahli dibidangnya. Profesional dan keahlian diperoleh melalui jenjang pendidikan. baik formal ataupun informal. Tentunya untuk mendapatkan pendidikan yang baik dibutuhkan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung dalam menyokong proses belajar mengajar yang berkualitas ini berimplikasi terhadap tingkat pembiayaan pemerintah. Artinya biaya yang tinggi ataupun rendah sangat berpengaruh

terhadap kualitas pendidikan dan proses pembelajaran serta kualitas *outcomes.* Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan terhadap sektor pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas pendidikan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah biaya yang dikeluarkan terhadap sektor pendidikan maka semakin rendah pula kualitas pendidikan dan kualitas *outcomes* yang dihasilkan.

Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan juga diprediksi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui kualitas pelayanan publik. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang berkualitas mendukung kelancaran kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Semakin efektif dan efisien pelayanan publik maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena hambatan dalam pemberian pelayanan jasa, barang dan administrasi dapat diminimalisir.

2.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis awal pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan (X) berpengaruh positif terhadap indeks kualitas pelayanan publik pemerintah daerah (Z).

H2: Kualitas pelayanan publik pemerintah daerah (Z) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene (Y).

H3: Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene (Y).

H4: Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan (X) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) melalui kualitas pelayanan publik (Z).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan deskriptif, analisis, interpretasi data dan pengolahan data statistik yang telah di jelaskan secara sistematis pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap indeks kualitas pelayanan publik.
2. Indeks kualitas pelayanan publik memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui indeks kualitas pelayanan publik.

Investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang di keluarkan oleh pemerintah melalui alokasi anggaran untuk membiayai sektor pendidikan. Pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan yang tinggi akan menciptakan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat, memperbaiki fasilitas dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai akses kepada pendidikan secara merata dan bisa menyelesaikan pendidikan sampai kepada perguruan tinggi. Kemajuan suatu daerah dapat diukur berdasarkan salah satu indikator yang utama

yaitu pendidikan. Apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi, maka semakin besar peluang masyarakat masuk ke dalam dunia kerja. Dengan pendidikan yang tinggi, masyarakat mampu untuk meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi melalui peningkatan produktivitas dan pendidikan yang tinggi juga mempengaruhi pelayanan publik menjadi lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar ini berimplikasi kepada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

5.2 Keterbatasan Peneliti

Berdasarkan hasil dari penelitian ini peneliti sangat sadar atas keterbatasan dan kelemahan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan masih sangat kurang untuk mengukur sebuah data pada skop kabupaten.
2. Model penelitian ini hanya meneliti pengaruh pembiayaan pemerintah di sektor pendidikan sebagai variabel independen dan indeks kualitas pelayanan publik sebagai variabel intervening/mediasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan penelitian ada beberapa saran yang dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah khususnya di sektor pendidikan diharapkan untuk meningkatkan pembiayaan, kualitas pelayanannya administrasi dan meningkatkan fasilitas seperti peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam pemenuhan pelayanan masyarakat untuk menciptakan kepuasan masyarakat.

2. Kepada peneliti selanjutnya di masa yang akan datang yang menjadikan penelitian ini sebagai referensi agar dapat menambah variabel independen.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian yang sama atau yang ingin mengkaji ulang penelitian ini baiknya dapat dilakukan pada kota/kabupaten lain untuk memperolah populasi yang berbeda ataupun sampel yang lebih banyak seperti pada penelitian ini sampel yang digunakan hanya 204 orang baiknya sampel tersebut di tambah sesuai kebutuhan peneliti dengan jumlah maksimal 500 sampel dalam mengukur fenomena yang terjadi di masyarakat pada wilayah kabupaten untuk menciptakan generalisasi penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adelfina dan I Mane Jember. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol.5. No. 10 Oktober 2016. ISSN: 2303-0178.*

Arham, Muhammad Amir. (2019). Analisis Pembiayaan, Kinerja Pendidikan dan Pertu mbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi. Volume 15 No 2.*

Ariani & Susanti. (2015). Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Financial Literacy Mahasiswa Angkatan 2012. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK), Vo.3, No 2.*

Arianto, Dwi Agung Nugroho. (2016). *Pengaruh Usia, Pendidikan dan Budaya Terhadap Kepatuhan Lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Jepara*. Kudus. Stikes Muhammadiyah Kudus.

Azizah, Nur. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Berbagai Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin.

Bado, Basri dkk. (2017). *Model Kebijakan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi.* Makassar. Pusat Kegitan Belajar Masyarakat (PKBM).

Bilgah. (2018). Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Dinas Perhubungan Kota Depok. *Jurnal Cakrawala, Vol. XVIII, No. 1, Maret 2018.*

Cahyani, Nanda Yuni. (2019). *Kualitas Pelayanan Pengaruh Terhadap Kepuasan Pasien pada UPT Puskesmas Panceng*. Gresik. Universitas Muhammadiyah.

Charyani, Dea dkk. (2022). Pengaruh Biaya Pendidikan Terhadap Mutu Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Swasta. *Jurnal: Penelitian dan Pengembangan di Bidang Administrasi.Volume 10 No. 2.*

Daga, Rosnaini dkk. (2020). Analisis Efektivitas Program Mandiri Dagang Untung pada PT. Bank Mandiri (Perseroan). Tbk. Kanwil Regional X

Sulawesi dan Maluku. *SEIKO: Journal of Management & Business. ISSN: 2598-831X*.

Danawati dkk. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Volume 5 No. 7. ISSN: 2337-3067.*

Dewi dkk. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Usaha Tani dan Keberhasilan Program Simantri di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6 (2), 701-728, 2017.*

Dianaputra, I Gede Komang Angga dan Luh Putu Aswitari. (2017). Pengaruh Pembiayaan Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Kualitas Manusia Serta Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2011-2015. *E-Jurnal EP Unud, 6 [3]: 115-146.*

Gering, Godensia. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Profesionalisme Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. *eJornal pemerintah integratif. 5 (1): 111-123. ISSN: 2337-8662.*

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.* Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hendriyani, Yuanisa Muliana. (2018). *Dampak Subsidi Pendidikan Bos dan Kip pada Pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Non Miskin di Wilayah Bandung Timur.* Bandung. Program Studi Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pasundan Bandung.

Istanti, Yuni. (2020). *Pengaruh Sikap Terhadap Iklan Luar Ruang pada Minat Berkunjung Ulang yang Dimediasi oleh Citra Destinasi*. Yogyakarta. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Kahang, Merang. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi. Volume 18 No 2.*

Khabiba, Yuni. (2018). *Pengaruh Investasi Penenaman Modal dalam Negri (PMDN), Angkatan Kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi jawa Tengah Tahun 2011-2016.* Kudus. Skribsi, IAIN.

Laisina dkk. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap PDRB Melalui Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara Tahun 2003-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efiensi. Volume 15 No. 14 Tahun 2015.*

Mulyawan, Rahman. (2016). *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Sumedang. Unpad Press.

Nazar, Saeful. (2019). *Pengaruh Keragaman Produk dan Stor Atmosphere Terhadap Kepuasan Konsumen Distro Heaven (Survei pada Pengunjung Distro Heaven Turnojoyo Bandung).* Bandung. Skripsi (S1), Perpustakaan Fakults Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.

Nugroho, Meidita Mayang Putri. (2020). *Pengaruh Keputusan Investasi, Pendanaan, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Property and Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Surabaya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA).

Nurmala. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SDN Dharma Patra. *EducanduM: Jurnal Manajemen Pendidikan. Volume 12, No 1.*

Purnami, Ni Made Sasih dan Ida Ayu Nyoman Saskara. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Jumlah Penduduk Miskin. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol.5, No.11 November 2016. ISSN: 2303-0178.*

Rahmadani, Ira. (2018). *Kualitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar*. Makassar. Diploma Thesis, Universitas Negeri Makassar.

Rapanna, Patta. (2016). Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi. *Jurnal Makassar: CV Sah Media.*

Safrianto, Yoyon. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekombis. Volume 4 No 1.*

Safrianto, Yoyon. (2019). Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh. *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen. Volume 3 No. 1, 2019.*

Sandri, Ni Ketut. (2016). Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol.21, No. 1, Februari 2016.*

Sanggelorang, Septiana. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pemerintah Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 15 No. 02-Edisi Juli 2015. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNSRAT Manado.*

Sari, Laila Fatmala. (2019). *Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Human Capital Investment Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Bandar Lampung Tahun 2010-2017 Perspektif Ekonomi Islam.* Bandar Lampung. Universitas Negeri Intan Lampung.

Sari, Purnama. (2018). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. *Jurnal Edukasi. Volume 5 No 2.*

Satriadi, Dimas. (2017). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Produktivitas Kerjas. *Jurnal Benefita. Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi. E-ISSN: 2477-7862.*

Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Wardhani, Erwin R. (2018). *Manajemen Perubahan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Internal.* Bandung. S2 Thesis, Universitas Pendidikan Indonesia.

Wibowo, Sigit. (2016). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Studi di Provinsi Jawa Tengah.* Jakarta. TAPM. Program Pascasarjana. Universitas Terbuka.

Wijanarko, Fahmi Reza dkk. (2017). *Karbonisasi Lignin Sebagaimana Material Graphite dan Graphene*. Surabaya: Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Institut Sepuluh Nopember Surabaya.

Wulandari, Firda Amanda. (2018). *Pelayanan Klaim Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar*. Makassar: Universitas Nageri Makassar.

Sumber Lain

Data Anggaran - Neraca Pendidikan Daerah - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). https://npd.kemdikbud.go.id/?appid=anggaran

Kemenkeu. (2018). *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011*. https://www.kemenkeu.go.id

Sulawesi Barat - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. (2021). https://id.m.wikipeda.org/wiki/Sulawesi-Barat

Zeithaml. (2018). *Service Quality Dimensions. Services Marketing Integrating Customer Focus Across the the Firm I* (7tn ed.) MC Graw Hil Education.